

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dinarasikan kerangka teori yang akan digunakan dalam membaca data yang muncul di lapangan. Peneliti menggunakan konsep partai politik, yang meliputi pengertian partai politik, fungsi partai politik, klasifikasi partai politik, dan partai politik di Indonesia serta konsep kaderisasi yang meliputi pengertian kaderisasi, subjek dan objek kaderisasi, kaderisasi formal dan informal, kaderisasi partai politik, serta sistem pengkaderan.

Untuk lebih detailnya, kerangka teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Konsep Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Pada bulan Mei tahun 1998, tonggak demokrasi Pancasila resmi ditancapkan. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan menandai dimulainya babak baru kehidupan politik di negeri ini. Harapan akan terbentuknya kehidupan politik nasional yang demokratis begitu kuat menancap dibenak publik. Euforia politik yang mewarnai masa-masa itu diwujudkan melalui pendirian partai politik yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Semua berlomba untuk mengisi kevakuman pemimpin nasional.

Di dalam ilmu politik, partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran proses politik di dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan. Partai politik merupakan agen demokratisasi di dalam sebuah sistem politik yang demokratis.

Dalam definisinya, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dimana partai politik adalah

suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.¹²

Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul *Economic et Societe* (1959) Max Weber kemudian mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organissai yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.¹³

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijaksanaan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan eksistensi.

Carl J. Fiedrich mendefinisikan partai politik sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idil maupun materil kepada anggotanya.¹⁴

Partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah

¹²Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 160

¹³Firmanzah, Ph.D, Mengelola Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 67

¹⁴ Miriam Budiarjo, Op.Cit,161

(*legitimate*) dan damai. Partai politik merupakan satu keharusan dalam kehidupan politik yang modern dan demokratis.¹⁵

Partai politik dilihat sebagai *autonomous groups that make nominations and contest elections in the personnel and policies of government* (Ranney & Kendall, 1956).

Dalam konteks ini, mereka melihat bahwa tujuan utama dibentuknya partai politik adalah mendapatkan kekuasaan dan melakukan kontrol terhadap orang-orang yang duduk dalam pemerintahan sekaligus kebijakannya. Partai politik sangat terkait dengan kekuasaan, untuk membentuk dan mengontrol kebijakan publik. Selain itu, partai politik juga diharapkan independen dari pengaruh pemerintah. Hal ini tentunya menyiratkan agar partai politik bisa mengkritisi setiap kebijakan dan tidak tergantung pada pemerintah yang dikritisi.¹⁶

La Palombara dan Weiner (1966) mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas partai politik. Keempat karakteristik dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpinnya yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi, dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila di dukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Dan ada pola interaksi yang teratur diantara keduanya. Struktur

¹⁵ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998), 11

¹⁶ Firmanzah, Op. Cit, 67

organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.

3. Tujuan berkuasa. Partai politik dididrikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik level lokal maupun nasional. Siapa yang memimpin negara, propinsi atau kabupaten, pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi hadirnya partai politik. Ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti asosiasi, perserikatan dan ikatan.
4. Dukungan politik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu medapatkan dukungan luas dari masyarakat. Dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus mampu diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar pula legitimasi yang diperolehnya.¹⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Secara sederhana partai politik merupakan representition of ideas yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat atau

¹⁷ Ibid, 68

tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

Menurut Sigmund Neumann mengatakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁸

Sedangkan menurut Roger Soltau partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaanya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri. Roger Soltau mengkaji bahwa partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas. Partai politik merupakan salah satu pilar dan institusi demokrasi yang penting dalam membangun politik yang lebih berkualitas dan beradab. Partai politik dengan perbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern saat sekarang ini.

Karena itu, tidak keliru apabila Samuel P. Huntington pernah mengutarakan bahwa partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi akan menjajikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik.

¹⁸ Imam Yudhi Prasetya, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011

b. Fungsi Partai Politik

Partai politik sesungguhnya adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai orientasi sama yang terbentuk dalam suatu wadah lembaga formal berdasar kepada ketentuan konstitusi kelembagaan dan mengikuti sistem politik dan sistem pemilihan yang ada.

Seperti halnya organisasi lain yang beroperasi dalam tataran *public sphere*, partai politik perlu melihat kembali peran dan tugas yang diembannya. Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.¹⁹

Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain:²⁰

1) Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan

¹⁹ Firmanzah, Op.Cit, 67

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 167

komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara efektif melalui partai politik.

2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara

tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada masyarakat.

3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

4) Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.

5) Sebagai Sarana pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi

sebagai pengatur konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang berasal dari partai-partai politik.

c. Tujuan Partai Politik

Dalam kehidupan yang demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara yang menjalankan demokrasi. Bahkan pendapat yang ekstrim yang mengatakan bahwa tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik didalamnya, karena partai politiklah yang memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi. Dengan adanya partai politik maka masyarakat akan merasakan mempunyai negara atau pemerintah, karena ketika tidak ada kekuatan penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan digunakan secara berlebihan dan tentunya masyarakatlah disini yang akan selalu dirugikan melalui kebijakan-kebijakannya.

Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Perlu diterangkan bahwa partai berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai

cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat di antara anggota-anggotanya dan dapat menumbuhkan suatu identitas kelompok (*group identity*) yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik. Berbeda dengan partai politik, gerakan sering tidak mengadukan nasib dalam pemilihan umum.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (*interest group*). Partai politik bertujuan memperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang luas melalui mekanisme pemilu, sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan yang lain seperti kelompok profesi, kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar kepentingan-kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti pemilu.

d. Klasifikasi Partai Politik

Partai politik dianggap sebagai attribut suatu negara dan mempunyai fungsi yang erat kaitannya dengan jalannya pemerintahan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahawa partai politik dapat berfungsi untuk ikut serta dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Partai politik adalah institusi politik yang berupa organisasi nonpemerintah, yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan serta kedaulatan rakyat. Perbedaan partai politik dari lembaga sosial kemasyarakatan lainnya adalah bahwa partai politik dapat berperan dalam penentuan kebijakan publik, di mana kebijakan tersebut bisa membawa dampak kemaslahatan yang lebih luas bagi

masyarakat dan mengakibatkan risiko pertanggungjawaban publik menjadi lebih besar.

Selain memiliki peran dan fungsi yang penting, partai politik juga diklasifikasikan ke dalam tipologi tertentu. Klasifikasi partai politik dapat didasarkan atas beberapa hal diantaranya, dari segi komposisi, fungsi keanggotaan dan dasar ideologinya.

Dalam klasifikasi berdasarkan komposisi dan fungsi keanggotaan, partai politik dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu partai kader dan partai massa. Menurut Haryanto, partai politik dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:²¹

1. Partai massa, dengan ciri utamanya adalah jumlah anggota atau pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai jenis ini memiliki program walaupun program tersebut agak kabur dan terlampaui umum. Partai jenis ini cenderung menjadi lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam partai tersebut mempunyai keinginan untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya, jika kepentingan kelompok tersebut tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan partai sendiri.
2. Partai kader, kebalikan dari partai massa, partai kader mengandalkan kader-kadernya untuk loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena memang tidak mementingkan jumlah, partai kader lebih mementingkan disiplin anggotanya dan ketiaatan dalam berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap terjamin kemurniannya. Bagi anggota yang menyeleweng, akan dipecat keanggotaannya.

²¹ Haryanto. *Mengenal Teori-Teori Politik*. (Depok: Grasindo, 2005), 567

Partai kader biasanya lebih mementingkan keketatan, disiplin dan kualitas anggota. Kelemahan partai kader ini terutama dalam mencari dukungan, biasanya mereka kalah dalam persaingan mengumpulkan jumlah dukungan di masyarakat luas karena dianggap anggota partai kader terbatas pada kelompok-kelompok tertentu.

Partai massa merupakan kebalikan dari partai kader karena mereka lebih menekankan pada pencarian jumlah dukungan yang banyak di masyarakat atau dengan kata lain lebih menekankan aspek kuantitas. Kelemahan partai massa adalah bahwa disiplin anggota biasanya lemah, juga lemahnya ikatan organisasi sesama anggota, bahkan kadang kala tidak saling kenal, karena luasnya dukungan dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat.

Perkembangan partai massa sebenarnya berawal dari partai kader. Partai-partai kader yang sebelumnya masih terbatas keanggotaannya pada kalangan tertentu mulai membuka diri untuk keanggotaan yang lebih luas.

Sedangkan tipologi berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi dan kepentingan, menurut Ichlasul Amal terdapat lima jenis partai politik, yakni:²²

1. Partai proto, adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Ciri yang paling menonjol partai ini adalah perbedaan antara kelompok anggota atau *ins* dengan non anggota atau *outs*. Selebihnya partai ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena itu sesungguhnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi masyarakat.
2. Partai kader, merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto. Keanggotaan partai ini terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas.

²² Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998)

Akibatnya, ideologi yang dianut partai ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformis moderat;

3. Partai massa, muncul saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai respon politis dan organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa berorientasi pada pendukungnya yang luas, misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan memiliki ideologi cukup jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk mencapai tujuan-tujuan ideologisnya.
4. Partai diktatorial, sebenarnya merupakan sub tipe dari parti massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota partai dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa.
5. Partai *catch-all*, merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah *Catch-all* pertama kali di kemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan perubahan karakteristik. *Catch-all* dapat diartikan sebagai menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang kaku.

e. Partai Politik Di Indonesia

Perjalanan sejarah pertumbuhan partai politik di Indonesia dimulai pada awal abad ke 19 yang diinisiasi oleh Pemerintah Belanda melalui politik etis (*Ethisce Politiek*) dengan Undang-Undang Desentralisasi 1903 dan pada Tahun

1906 didirikan *Volksraad* sebagai lembaga perwakilan politik pertama, keanggotaan dari lembaga ini ditunjuk oleh Gubernur Jenderal, melahirkan elit politik yang bergantung pada kekuasaan pemerintah. Namun disisi lain, kebutuhan akan jati diri sebagai wakil rakyat memicu para anggota *Volksraad* untuk membentuk partai politik.²³

Sejalan dengan peristiwa tersebut, kaum terpelajar Indonesia mulai mengorganisasikan diri kedalam kelompok-kelompok sosial yang dibentuk oleh mereka. Kelompok-kelompok sosial yang dibentuk ini awalnya tidak bergerak pada bidang politik namun karena aktivitas mereka selalu diawasi dan terganjal dengan kebijakan pemerintah pada saat itu, sementara partai-partai politik yang ada pada waktu itu tidak dapat mengakomodir aspirasi dan keinginan rakyat yang kemudian membuat mereka untuk terlibat langsung dalam politik praktis dengan maksud agar dapat melalukan perubahan.

Kilas balik sejarah politik ini menyajikan fakta bahwa tradisi berpartai di Indonesia diawali dengan kemunculan partai-partai sejak kejatuhan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan reformasi yang terjadi pada Tahun 1998 ini merupakan salah satu bentuk perubahan sosial politik yang kemudian memunculkan agenda baru serta gerakan dan pengelompokan politik yang baru pula. Gerakan reformasi ini menuntut terjadinya perubahan pada berbagai dimensi kehidupan sosial maupun politik di negara ini. Gerakan reformasi 1998 menuntut adanya perbaikan hubungan politik dalam empat aspek, yakni :

1. Transformasi hubungan antara penyelenggara negara dengan rakyat; dimana praktek kedaulatan negara harus dialihkan menjadi kedaulatan rakyat.

²³ Kahin, G. McT, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1952)

2. Rekonstruksi hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan mekanisme *chek and balance* dalam proses politik.
3. Pergeseran landasan hukum bagi aktivitas politik, dari rule by using menjadi *rule of law*.
4. Mengeliminasi dasar hubungan politik dan ekonomi yang membuka peluang bagi bekerjanya praktik pemerintahan yang kolutif dan koruptif.²⁴

Sebenarnya gerakan yang terjadi pada Tahun 1998 telah memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan partai politik yang ada di tanah air, untuk dapat lebih memainkan perannya dalam membangun struktur dan mekanisme baru dibidang politik menuju kehidupan yang lebih demokratis, namun yang terjadi justru sebaliknya, partai politik tidak bisa meraih peluang emas tersebut.

Partai politik justru terjerumus masuk kedalam format politik yang diimajinasikan oleh rezim yang berkuasa setelah gerakan reformasi terjadi, inilah kesalahan mendasar dari partai politik yang seharusnya partai politik merupakan aktor pembentuk rejim dan mediator aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan pemerintah sebagai pelaksanaan kedaulatan, dengan fungsi ini seharusnya partai politik sanggup memberi warna tersendiri dalam pembangunan demokrasi di negara ini.

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Di dalam pasal 1 dijelaskan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

²⁴ Denny J. A, *Politik Yang Mencari Bentuk*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2006), 37

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, pada bab V pasal 11 tentang tujuan dan fungsi partai politik dijelaskan partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d) Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender

Lebih lanjut lagi, pada bab V pasal 10 tentang tujuan dan fungsi partai politik, dijelaskan bahwa tujuan umum partai politik adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan cita-cita nasional bartgsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara tujuan khusus partai politik Berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2008 tersebut antara lain:

- a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada bab XI pasal 29 dijelaskan bahwa partai politik juga melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

1. Anggota Partai Politik
2. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
4. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rekrutmen ini harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. Selain melakukan rekrutmen partai politik juga melakukan pendidikan politik. Seperti yang dijelaskan dalam bab XIII pasal 31, ayat 1 partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

B. Konsep Kaderisasi

a. Pengertian Kaderisasi

Kaderisasi merupakan proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh.²⁵

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya. Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

Dengan adanya kaderisasi, diharapkan organisasi akan bertahan dalam waktu cukup lama, tidak bersifat *ad-hoc* dalam mengembangkan visi dan melaksanakan misinya. Pepatah Belanda mengatakan *on mis baar*, yang kalau diterjemahkan secara bebas berarti tidak ada di dunia ini atau organisasi apapun yang tidak tergantikan.

²⁵ <http://annisalidramaribeth.wordpress.com/2011/02/26/kaderisasi/> diakses pada 25 Juni 2013

Pada saatnya seorang pemimpin secara alamiah atau sebab lain pasti akan turun dan digantikan oleh yang lain. Apalagi bagi pemimpin organisasi modern, yang anggotanya terdiri dari manusia-manusia yang mempunyai pemikiran rasional, mempunyai wawasan ke depan, serta semakin tidak populernya teori timbulnya pemimpin karena dilahirkan. Pemimpin tumbuh dan berkembang karena melalui proses pembinaan dan dimatangkan oleh lingkungan. Sistem pengkaderan di dalam suatu partai akan sangat tergantung dari besar kecilnya organisasi, lingkup atau bidang kegiatan yang menjadi misi pokok, sistem nilai yang dianut, serta eksistensi organisasi, apakah sementara atau jangka panjang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaderisasi memiliki peran yang sangat penting. Adapun peran penting kaderisasi adalah sebagai berikut:²⁶

1. Pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik

Proses transfer nilai adalah suatu proses untuk memindahkan sesuatu (nilai) dari satu orang ke orang lain. Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang tertulis atau yang sudah tercantum dalam aturan-aturan organisasi (seperti konsepsi, AD/ART, dan aturan-aturan lainnya) maupun nilai yang tidak tertulis atau budaya-budaya baik yang terdapat dalam organisasi (misalnya budaya diskusi) maupun kondisi-kondisi terbaru yang menjadi kebutuhan dan keharusan untuk ditransfer.

2. Penjamin keberlangsungan organisasi

Organisasi yang baik adalah organisasi yang mengalir, yang berarti dalam setiap keberjalanannya waktu ada generasi yang pergi dan ada generasi yang datang. Dengan demikian keberlangsungan organisasi dapat dijamin dengan adanya sumber daya manusia yang menggerakan, jika sumber daya manusia tersebut

²⁶<http://rezaprimawanhudrita.wordpress.com/2009/04/13/kenapa-harus-ada-kaderisasi/> diakses pada 25 Juni 2013

hilang maka dapat dipastikan bahwa organisasinya pun akan mati. Regenerasi berarti proses pergantian dari generasi lama ke generasi baru, yang termasuk di dalamnya adanya pembaruan semangat.

3. Sarana belajar bagi anggota

Tempat di mana anggota mendapat pendidikan yang tidak didapat di bangku pendidikan formal. Pendidikan itu sendiri berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam proses mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan. Pendidikan di sini mencakup dua hal yaitu pembentukan dan pengembangan. Pembentukan karena dalam kaderisasi terdapat output-output yang ingin dicapai, sehingga setiap individu yang terlibat di dalam dibentuk karakternya sesuai dengan output. Pengembangan karena setiap individu yang terlibat di dalam tidak berangkat dari nol tetapi sudah memiliki karakter dan skill sendiri-sendiri yang terbentuk sejak kecil, kaderisasi memfasilitasi adanya proses pengembangan itu. Pendidikan yang dimaksudkan di sini terbagi dua yaitu dengan pengajaran (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada karakter) dan pelatihan (yang dalam lingkup kaderisasi lebih mengacu pada *skill*). Dengan menggunakan kata pendidikan, kaderisasi mengandung konsekuensi adanya pengubahan sikap dan tata laku serta proses mendewasakan. Hal ini sangat terkait erat dengan proses yang akan dijalankan di tataran lapangan, bagaimana menciptakan kaderisasi yang intelek untuk mendekati kesempurnaan pengubahan sikap dan tata laku serta pendewasaan.

Terkait dengan fungsinya, kaderisasi memiliki fungsi antara lain:

1. Melakukan rekrutmen anggota baru

Penanaman awal nilai organisasi agar anggota baru bisa paham dan bergerak menuju tujuan organisasi.

2. Menjalankan proses pembinaan, penjagaan, dan pengembangan anggota
Membina anggota dalam setiap pergerakannya. Menjaga anggota dalam nilai-nilai organisasi dan memastikan anggota tersebut masih sepaham dan setujuan. Mengembangkan skill dan knowledge anggota agar semakin kontributif.
3. Menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota sekaligus sebagai pembinaan dan pengembangan aktif
Kaderisasi akan gagal ketika potensi anggota mati dan anggota tidak terberdayakan.
4. Mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi
Kaderisasi bisa menjadi evaluator organisasi terhadap anggota. Sejauh mana nilai-nilai itu terterima anggota, bagaimana dampaknya, dan sebagainya.
Jadi, kaderisasi (sebagai proses) memiliki tugas atau tujuan sebagai proses humanisasi atau pemanusiaan dengan cara transofmasi nilai-nilai agar tri dharma perguruan tinggi dapat terwujud. Pemanusiaan manusia disini dimaksudkan sebagai sebuah proses pentrasformasian nilai-nilai yang membuat manusia (dalam hal ini mahasiswa) agar mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya (spiritual, intelektual dan moral).

b. Subyek Dan Obyek Kaderisasi

Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasianya dengan baik dan dinamis. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan.

Fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum.

Dari sini, pandangan umum mengenai kaderisasi suatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan kedua, sasaran kaderisasi (obyek). Untuk yang pertama, subyek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi.²⁷

Sedangkan yang kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Sifat sebagai subyek dan obyek dari proses kaderisasi ini sejatinya harus memenuhi beberapa fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader organisasi yang handal, cerdas dan matang secara intelektual dan psikologis.²⁸

Sebagai obyek dari proses kaderisasi, sejatinya seorang kader memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk melanjutkan visi dan misi organisasi ke depan. Karena jatuh bangunnya organisasi terletak pada sejauh mana komitmen dan keterlibatan mereka secara intens dalam

²⁷<http://www.dakwatuna.com/2012/07/05/21460/mengapa-harus-ada-kaderisasi-dalam-organisasi/> diakses pada 25 Juni 2013, pukul 16.30 wib

²⁸<http://www.dakwatuna.com/2012/07/05/21460/mengapa-harus-ada-kaderisasi-dalam-organisasi/> diakses pada 25 Juni 2013, pukul 16.30 wib

dinamika organisasi, dan tanggung jawab mereka untuk melanjutkan perjuangan organisasi yang telah dirintis dan dilakukan oleh para pendahulu-pendahulunya.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam hal kaderisasi adalah potensi dasar kader sebagai bentuk upaya mencari bibit-bibit unggul dalam kaderisasi.

Di sisi lain, subyek kaderisasi juga harus mampu menawarkan visi dan misi ke depan yang jelas dan memikat, serta menawarkan dinamika organisasi yang menantang bagi para kader yang potensial, sehingga mereka dengan senang hati akan terlibat mencerahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi. Untuk dapat menjalankan peran tersebut, maka organisasi atau sebuah pergerakan harus terlebih dahulu mematangkan visi-misi mereka, dan termasuk sikap mereka terhadap persoalan mendesak dan aktual kemasyarakatan, serta pada saat yang sama tersedianya para pengkader yang handal, untuk menggarap bibit-bibit potensial tadi.

Kader-kader potensial, setelah mereka memahami dan meyakini pandangan dan sistem yang telah diinternalisasikan, maka jiwanya akan terpacu untuk bekerja, berkarya dan berkreasi seoptimal mungkin. Maka, di sini, organisasi dituntut untuk dapat mengantisipasi dan menyalurkannya secara positif. Dan memang sepatutnya organisasi-pergerakan mampu melakukannya, karena bukankah yang namanya organisasi-pergerakan berarti terobsesi progresif bergerak maju dengan satu organisasi yang efisien dan efektif, bukan sebaliknya.

Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang tidak boleh tidak dilakukan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses

perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tetapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.

c. Kaderisasi formal dan informal

Proses Kaderisasi adalah kegiatan yang berisi upaya-upaya yang mendukung bagi terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan menggerakkan orang lain secara intensif sehingga dapat mempersiapkanya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Dari proses kaderisasi ini melahirkan seorang kader.

Dalam salah satu kamus istilah kader ini diartikan sebagai bagian dari anggota yang terikat dengan disiplin dan bekerja secara maksimal. Akan tetapi di sini seorang kader itu diartikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang sebuah amanah kepemimpinan atau sebuah jabatan baik itu di organisasi pemerintahan maupun di organisasi lain.

Ada beberapa faktor mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan antara lain:²⁹

1. Adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki kepemimpinannya diganti, baik secara wajar maupun tidak wajar.
2. Proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin.
3. Kematian

Dalam pelaksanaannya proses kaderisasi ada dua macam yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:³⁰

1) Kaderisasi informal

Kaderisasi informal merupakan sebuah proses atau usaha-usaha untuk mempersiapkan seorang calon pemimpin atau seorang kader yang dilaksanakan tidak secara berencana, teratur tertib, sistematis, terarah dan disengaja serta tidak menggunakan kurikulum tertentu. Akan tetapi kaderisasi informal ini merupakan sebuah proses pendidikan sehari-hari yang dimulai dari sejak dini, baik itu proses belajar di sekolah, pendidikan yang diberikan keluarga dan lingkungan masyarakat setempat. Proses ini menekankan pembentukan kepribadian dan penanaman akhlak dan sikap yang baik dalam jangka waktu yang lama. Kepribadian positif perlu dipupuk sejak dini dan seumur hidup.

Dari proses kaderisasi informal ini dapat diketahui kelebihan seseorang calon pemimpin yang memiliki kepribadian positif. Hal ini bisa dilihat dari

²⁹ Indra Bambang Utomo, *Sistem Kaderisasi Kepemimpinan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Masa Mendatang*, (Departemen Pertahanan Keamanan RI, Lembaga Ketahanan Nasional, 1994), 50

³⁰<http://jsfas.blogspot.com/2009/12/kaderisasi-kepemimpinan-proses.html> diakses pada 25 juni 2013, pukul 17.00 wib

prestasinya, loyalitas dan dedikasinya adlamm sebuah kelompok atau organisasi yang diikutinya, serta akhlak dan agamanya atau loyalitasnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2) Kaderisasi Formal

Kaderisasi formal merupakan proses kaderisasi atau upaya mempersiapkan seseorang menjadi calon pemimpin yang dilaksanakan secara disengaja, terarah, teratur dan tertib, sistematis dan mengikuti kurikulum tertentu dalam jangka waktu tertentu yang berisi bahan-bahan teoretis dan praktik tentang kepemimpinan dan berbagai aspek pendukungnya.

Beberapa usaha kaderisasi formal yang bersifat interen dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

- Memberi kesempatan menduduki jabatan pemimpin pembantu.
- Latihan kepemimpinan di dalam atau di luar organisasi.
- Memberikan tugas belajar.
- Penugasan sebagai pucuk pimpinan suatu unit

Sedangkan kaderisasi formal yang bersifat eksteren dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyeleksi sejumlah generasi muda lulusan lembaga pendidikan jenis dan jenjang tertentu untuk diangkat memimpin suatu unit yang sesuai atau ditugaskan magang sebelumnya.
- b. Menyeleksi sejumlah generasi muda lulusan lembaga pendidikan jenis dan jenjang tertentu, kemudian ditugaskan belajar pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam dan di luar negeri sebelum ditempatkan pada posisi tertentu.

- c. Memesan sejumlah generasi muda dari lembaga pendidikan formal dengan program khusus sesuai dengan bidang yang dikelola organisasi pemesan dengan syarat tertentu.
- d. Menerima sejumlah generasi muda dari lembaga pendidikan untuk melakukan kerja praktik di lingkungan organisasi.
- e. Memberikan beasiswa belajar bagi orang yang tidak mampu kemudian setelah lulus langsung ditempatkan pada jalur yang memberi peluang untuk melatih dan mempersiapkan diri menjadi pimpinan secara bertahap.

d. Kaderisasi Partai politik

Di era reformasi seperti ini, keberadaan partai politik (parpol) sangat penting dalam proses demokrasi. Partai menjadi jembatan warga negara untuk masuk ke dalam sistem penyelenggaraan negara. Menurut Undang-undang UU No.2 Tahun 2008, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Parpol sebagai jembatan demokrasi, parpol memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut antara lain sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar paham akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Parpol juga berfungsi menciptakan kondisi kondusif dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dirumuskan dalam kebijakan publik yang adil.

Fungsi lain dari parpol adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam rekrutmen jabatan politik melalui mekanisme demokrasi (pemilu

atau pemilu kepala daerah). Dari tiga fungsi tersebut, fungsi terakhirlah yang paling menonjol dan menjadi fokus utama parpol-parpol di Indonesia. Padahal, seharusnya, selain mempunyai tujuan memenangi pertarungan perebutan kekuasaan, partai politik mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan politik kepada publik, sosialisasi kebijakan pemerintah dan juga kaderisasi pemimpin melalui proses rekrutmen politik. Ketimpangan fungsi parpol tersebut menunjukkan kurangnya proses dan mekanisme kaderisasi parpol.

Secara umum kaderisasi dapat didefinisikan sebagai proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai ideologi organisasi kepada anggota (kader) organisasi. Dengan kaderisasi yang baik, keberlanjutan dan pengembangan organisasi di masa depan dapat terjadi.

Dalam konteks parpol, kaderisasi menjadi proses peningkatan kapasitas dan seleksi bagi calon pengisi jabatan politik seperti kepala negara/daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, proses dan mekanisme kaderisasi menjadi hal penting dan strategis bukan hanya bagi parpol tapi juga bagi masyarakat. Kader parpol merupakan calon pejabat publik yang akan menentukan kebijakan publik.

Dalam proses kaderisasi parpol ada empat hal pokok yaitu pelaku kaderisasi (subjek), sasaran kaderisasi (objek), mekanisme (proses) dan kurikulum materi kaderisasi. Pelaku kaderisasi adalah organ parpol yang difungsikan menyiapkan dan melaksanakan kaderisasi. Sasaran kaderisasi merupakan individu-individu yang dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi parpol. Mereka pula yang akan memperjuangkan tercapainya tujuan organisasi di masa depan. Mekanisme dan materi biasanya diatur

berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga parpol dan peraturan internal partai.

Untuk mewujudkan proses kaderisasi yang baik diperlukan manajemen parpol yang baik terlebih dahulu. Manajemen parpol yang baik dapat dilihat dari kepengurusan, pengelolaan keuangan, dan program kerja partai parpol. Yang paling mudah dilihat dan dirasakan masyarakat adalah kepengurusan dan program kerja parpol. Namun, hal ini biasanya hanya menonjol menjelang proses pemilihan, baik pemilu maupun pilkada. Padahal, proses demokrasi bukan hanya saat pemilihan.

Pendidikan politik melalui kaderisasi merupakan program kerja utama parpol. Parpol seharusnya menyiapkan organ untuk proses pengkaderan dengan menyusun kurikulum materi kaderisasi yang tidak hanya menstranfer visi, misi, dan ideologi parpol. Organ ini juga harus mampu membuat kaderisasi yang menarik, insentif, dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah dengan ditetapkannya UU No.2 Tahun 2011 untuk melengkapi UU No.2 Tahun 2008.

Namun realita di lapangan parpol tidak sungguh-sungguh melakukan proses kaderisasi. Kaderisasi belum menjadi prioritas bagi partai politik di Indonesia. Selama masa Orde Baru hingga era reformasi, mayoritas partai politik masih mengandalkan figur dan dinasti, untuk meraih dukungan dalam pemilihan umum (Pemilu).

Selain itu, akhir-akhir ini banyak parpol yang menerapkan kaderisasi instan dengan merekrut tokoh-tokoh yang dianggap populer atau mapan secara finansial untuk mendongkrat perolehan suara pada proses pemilihan. Kebijakan kaderisasi instan lebih banyak menghasilkan kader

yang pragmatis. Hal ini tentu akan merugikan partai dan masyarakat dalam jangka panjang. Bahkan tidak semua parpol memiliki mekanisme pengkaderan yang jelas. Jika pun ada parpol yang memiliki mekanisme, mekanisme pengkaderan tidak berjalan dengan baik. Dalam pelatihan ini juga terungkap minimnya kader perempuan yang dimiliki parpol. Tingkat pengetahuan dan pemahaman kader muda parpol akan visi, misi, dan ideologi parpolnya masih minim. Dalam pemahaman demokrasi, sistem politik, dan tata kelola penyelenggaraan negara terasa timpang antara kader partai besar dan partai kecil. Dari sini dapat menyimpulkan bahwa parpol belum menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik bagi kader dan konstituennya. Padahal masa depan sebuah partai terletak ditangan para kader dengan dukungan konstituennya.

Pendidikan politik melalui proses kaderisasi merupakan investasi jangka panjang parpol. Parpol yang serius mempersiapkan dan melaksanakan kaderisasi dengan baik akan mendorong perkembangan dan pertumbuhan parpol tersebut dimasa depan.

Bagi masyarakat umum, cara mudah menilai kualitas parpol dengan melihat mekanisme dan proses kaderisasinya. Jika sebuah parpol mampu melakukan kaderisasi yang baik dan berkelanjutan sudah hampir bisa dipastikan parpol tersebut memiliki manajemen yang baik. Kaderisasi yang baik juga mencerminkan visi, misi, dan ideologi parpol. Dengan kaderisasi yang baik, tentu parpol mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas secara mental dan intelektual sehingga mampu menjadi pemimpin dan anggota dewan yang kompeten dan berkualitas.

Dengan demikian produk-produk kebijakan publik yang dihasilkannya mampu menjadi pemecah masalah sosial dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.